



Notula Konreg PDRB ISE se-Sumatera 2024

<i>Keynote Speech</i>	
Hari/Tanggal	Selasa/27 Agustus 2024
Waktu	10.00-10.15 WIB
Materi	Penguatan Transformasi Ekonomi dan Sosial Wilayah Sumatra Menuju NKRI Yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan
Pemateri	Moh. Edy Mahmud (Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS)
Moderator	Tiffany Agina
Tempat	Ballroom Hotel BW Luxury, Jambi
Notulis	1. Poppi Marini 2. Nor Indah F. Ningrum
<ul style="list-style-type: none">• Inklusivitas pertumbuhan secara global negara kita dibandingkan dengan negara-negara lain pada saat ini berada pada peringkat 75 dari 129 negara. Ini artinya PR besar bagi negara kita kalau kita bicara tentang inklusivitas pertumbuhan secara nasional.• Ekonomi Sumatera masih didominasi oleh pertanian kemudian industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Dari sisi permintaan, perekonomian di Sumatera lebih banyak didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga kemudian PMTB, serta ekspor. <i>Share</i> industri pengolahan wilayah Sumatera lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi secara nasional. Beberapa indikator transformasi sosial di Sumatera juga lebih baik.• Sekitar 50-70 persen pasokan karet, kopi dan kelapa sawit berasal dari Sumatera. Potensi besar pertanian khususnya perkebunan perlu digarap bersama dengan kebijakan yang tepat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera.• Fokus kita ke depan barangkali meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari nilai tambah yang sekarang melalui program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah pertanian industri manufaktur dan sebagainya.• Kekurangan yang ada harus menjadi penyemangat bagi kita untuk mengembangkan ekonomi se-Sumatera.	

Materi I	
Hari/Tanggal	Selasa/27 Agustus 2024
Waktu	10.15-10.30 WIB
Materi	Sinergi Wilayah Sumatera untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Pemateri	Dra. Hj. Elviana, M.Si. (Ketua Komite IV DPD RI)
Moderator	Tiffany Agina
Tempat	Ballroom Hotel BW Luxury, Jambi
Notulis	1. Poppi Marini 2. Nor Indah F. Ningrum
<ul style="list-style-type: none"> • Data BPS adalah data yang sangat sah, dan rugi kalau kita di daerah tidak menggunakannya sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan, apalagi menyusun program ke depan. • Kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam daerah atau kekayaan daerah, kita tidaklah menjadi provinsi yang unggul. Ada hal-hal yang mungkin luput dari perkiraan kita bahwa kekuasaan anggaran itu sebenarnya masih di pusat. Program otonomi daerah perlahan-lahan akan ditarik ke pusat kembali. • Kekuasaan anggaran terpusat di istana presiden yang direpresentasikan dengan keberadaan kementerian dan yang satu lagi di kompleks parlemen Senayan ada DPR dan DPD. Ketika DPR dan pemerintah sedang rapat anggaran itu dua macam turunnya ke daerah, satu normatif yang keduanya lobi. • Ketika sulit untuk menembus istana dengan menjadi menteri, maka manfaatkanlah hubungan baik dengan politisi Senayan. Dengan cara memperbanyak anggota parlemen dari daerah, maka pembangunan di daerah juga akan lebih mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya wakil daerah yang memperjuangkan daerahnya. 	

Materi 2	
Hari/Tanggal	Selasa/27 Agustus 2024
Waktu	10.30-10.45 WIB
Materi	Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Neraca Sosial Ekonomi
Pemateri	Pipit Helly Sorayan (Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI)
Moderator	Tiffany Agina
Tempat	Ballroom Hotel BW Luxury, Jambi
Notulis	1. Poppi Marini 2. Nor Indah F. Ningrum
<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi Sumatera menguat dari triwulan sebelumnya, tapi melambat dibandingkan tahun lalu. Ketergantungan Sumatera terhadap ekspor impor, didominasi dengan ekspor CPO (industri makanan). • Jika dipetakan dengan menggunakan SNSE/SAM nasional, kemudian dilakukan <i>shock</i> pada industri manufaktur, akan mendorong aktivitas ekonomi lainnya terutama tiga sektor utama (pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan). Jika ekspor naik, maka akan menghasilkan kenaikan nilai tambah, terutama pada upah gaji. Ketika permintaan bahan baku naik, juga akan menciptakan nilai tambah. Nilai tambah ini ada yang dibawa ke rumah tangga, juga ada yang masih ditahan oleh perusahaan. • Saat ekspor Sumatera naik tinggi, nilai tambahnya masih ditahan di lembaga keuangan. Tabungan milik perusahaan justru naik lebih tinggi dibanding penyaluran kredit, menunjukkan bahwa nilai tambah tidak langsung digunakan untuk peningkatan ekspansi bisnis. • Jika konsentrasi pada industri manufaktur, ketika ekspor khususnya ekspor industri manufaktur naik satu satuan, maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan 1:13. • Di Sumatera, <i>share</i> ekonomi terbesar yaitu Sumatera Utara dan Riau, tapi pendapatan perkapita tertinggi yaitu di Riau dan Kepulauan Riau. • Target tahun 2036, Indonesia harus terlepas dari <i>Middle Income Trap</i> dengan target <i>income</i> perkapita 23 ribu USD. Dengan <i>income</i> PDB perkapita sekarang, apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan agar penduduknya dapat terlepas dari MIT. • Jika pariwisata menjadi pendorong ekonomi yang inklusif, kira-kira perlu wisatawan berapa juta orang, dengan target pengeluarannya berapa, konsumsi yang dikeluarkan apa saja. Jika dilakukan simulasi, apakah pariwisata lebih efektif dibanding industri manufaktur dsb, bisa melakukan simulasi untuk mendapatkan ekonomi yang inklusif, sekaligus menyelesaikan permasalahan transformasi sosial ekonomi yang inklusif. • Dengan memperhatikan piramida penduduk, dapat diketahui kebutuhan rumah tangga akan seperti apa, efek ekonominya seperti apa, yang diperlukan untuk perencanaan selanjutnya. 	

- Simulasi kedua tentang dampak bantuan sosial terhadap rumah tangga miskin, juga mampu mengurangi diskrepansi pendapatan antara golongan 20 persen paling atas dan 20 persen paling bawah. Ketika dorongan ekspor disandingkan dengan Bansos, maka ketimpangan yang tadinya 1:13 jika sebelumnya ekspor naik 1 satuan, namun jika dibandingkan dengan pemberian Bansos, maka rasio tadi turun menjadi 1:5.

Materi 3	
Hari/Tanggal	Selasa/27 Agustus 2024
Waktu	10.45-11.00 WIB
Materi	Kondisi dan Rencana Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Pemateri	Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA (Perencana Ahli Utama Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas)
Moderator	Tiffany Agina
Tempat	Ballroom Hotel BW Luxury, Jambi
Notulis	1. Poppi Marini 2. Nor Indah F. Ningrum
<ul style="list-style-type: none"> • Kita tidak bisa membuat satu keputusan mengenai kependudukan, ketenagakerjaan tanpa kita mengetahui potensi daerah di Sumatera. Pembangunan kewilayahan di Sumatera, fokus utamanya adalah sebagai mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya alam yang akan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi yang inklusif dan juga menjadi basis untuk pengembangan lapangan pekerjaan. • Khusus untuk Aceh sebagai Serambi Mekah sangat memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi rujukan pendidikan global, karena kita sekarang ini juga memasuki era di mana banyak sekali permintaan produk-produk halal, permintaan kebijakan-kebijakan perbankan atau keuangan yang halal. Jika Aceh dapat mengembangkan di bidang keislaman/syariah dengan akhlak Islam, dan kemudian merunut pada aturan agama yang baik, yang halal, tentunya ini akan membantu perekonomian bukan hanya di Aceh, tetapi juga di Sumatera. Mengenai IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT. Beberapa tahun terakhir ini banyak menyebutkan mengenai pentingnya kerjasama terhadap produk halal. Seharusnya harus kita tangkap dan kita kuatkan menjadi faktor pendorong khususnya di Aceh dan mungkin didukung oleh wilayah Sumatera yang lainnya. • Potensi Sumatera yang memiliki megabiodiversitas, menjadi potensi yang sangat besar baik di bidang kelautan maupun kehutanan. Salah satu yang dapat dikembangkan yaitu mengolah sampah dari pengolahan ikan laut, dapat memberikan potensi ekonomi, lapangan pekerjaan, dan inovasi industri. Megabiodiversitas akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sebagai model industri edukasi dan riset, kemudian untuk sejarah kelestarian budaya, serta rekreasi. Dalam membangun sektor pariwisata di suatu wilayah, yang harus dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas. • Pembangunan saat ini bukan dari manusia untuk manusia, tapi dari manusia untuk semesta. Apabila di Indonesia tidak merubah <i>mindset</i> ke arah pembangunan ekonomi hijau, maka berbagai kehancuran lingkungan akan terjadi. • Setiap struktur kependudukan memiliki pendekatan kebijakan yang berbeda. Hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera sudah memasuki puncak bonus demografi, hanya provinsi Aceh, Riau 	

dan Sumatera Selatan yang belum memasuki puncak bonus demografi.

- Persentase penduduk usia produktif di Sumatera mencapai 68 persen merupakan, menjadi potensi pembangunan di Sumatera. Wilayah dengan kondisi *aging population* yaitu Lampung dan Sumbar. Sehingga dalam menyusun kebijakan struktur populasi usia produktif menitikberatkan pada pendidikan dan lapangan kerja. Sedangkan dalam menyusun kebijakan untuk usia non produktif dalam hal ini lansia, adalah menciptakan lansia yang sehat, tangguh dan mandiri di kemudian hari.
- Menurunnya tenaga kerja pertanian, namun kemandirian pangan juga harus terus ditingkatkan. Dengan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Thailand, dimana negara tersebut memiliki produk pertanian dan kita juga perlu mandiri pangan di negeri sendiri. Jika Sumatera bisa mengikuti Thailand yang produk pertaniannya kuat dan terkenal. Maka ketika ekonomi melambat, produk pertanian justru bisa memasuki pasar internasional (hortikultura, buah tropis).
- Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dibawah Thailand dan Malaysia, sedangkan yang segera mengejar yaitu Vietnam.
- Kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan, sudah harus siap dengan perubahan mindset, memahami IT dan masuk ke *high skill*.

Materi 4	
Hari/Tanggal	Selasa/27 Agustus 2024
Waktu	11.00-11.15 WIB
Materi	Sinergi dan Kolaborasi dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Sumatera
Pemateri	Iman Gunadi, Ph.D. (Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara)
Moderator	Tiffany Agina
Tempat	Ballroom Hotel BW Luxury, Jambi
Notulis	1. Poppi Marini 2. Nor Indah F. Ningrum
<ul style="list-style-type: none"> • Ada divergensi dari kebijakan moneter. Inflasi semakin tinggi, suku bunga naik. Sebaliknya jika inflasi rendah, suku bunga menurun. Akibatnya ada ketidakpastian bagi investor untuk menempatkan dananya. Adanya perang kemudian juga harga komoditas yang melandai itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. • Adanya bencana berpengaruh terhadap <i>volatile food</i>, tapi sudah mulai terkendali. Ini ditunjukkan dengan data inflasi yang mulai membaik. Target inflasi 2024 yaitu 2,5 +/- 1 persen. • Tingkat suku bunga di negara maju mulai rendah, akibatnya terjadi <i>outflow</i> dari <i>emerging market</i> ke <i>developed market</i>. Untuk Indonesia, dengan inflow yang rendah sedangkan demand pembayaran hutang luar negeri membutuhkan valas yang tinggi. • Secara umum, perekonomian Indonesia masih kuat. Hanya ada beberapa catatan untuk ekonomi Sumatera yaitu pertumbuhan ekonomi masih cukup rendah. Sehingga jika tidak melakukan gebrakan maka konsumsi rata semakin lama makin menurun. • Rekomendasinya antar lain dengan meningkatkan <i>event</i> internasional (misal Visit Sumatera). Diperlukan sinergi kebijakan pariwisata antar daerah, dan mobilitas di Sumatera semakin tinggi, konsumsi akan lebih baik lagi. • Salah satu kendala konsumsi masyarakat yang menurun, pemerintah harusnya mempercepat penyerapan anggaran. Pagu yang naik 3,3 persen, tapi serapan masih cukup rendah. Alokasi dana Pilkada yang tinggi, tapi tidak ada efek signifikan dalam membantu meningkatkan penyerapan pemerintah, sehingga tidak bisa meningkatkan <i>multiplier effect</i> dari <i>spending</i> pemerintah. Akibatnya konsumsi masyarakat turun karena <i>income</i> ke masyarakat terganggu. 	

Materi 5	
Hari/Tanggal	Selasa/27 Agustus 2024
Waktu	11.15-11.30 WIB
Materi	Penguatan Transformasi Sosial Ekonomi Wilayah Sumatera
Pemateri	Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A. (Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan)
Moderator	Tiffany Agina
Tempat	Ballroom Hotel BW Luxury, Jambi
Notulis	1. Poppi Marini 2. Nor Indah F. Ningrum
<ul style="list-style-type: none"> • Di awal perubahan, transformasi diarahkan oleh pasar sehingga kapitalisme meningkat. Kalau ingin mentransformasi sosial ekonomi mestinya lebih terencana. Namun sekarang, transformasi diarahkan, melalui tahapan-tahapan sedemikian rupa. • Kebijakan pemerintah melakukan alokasi yang terencana ke wilayah Sumatera pada tahun 2024, tidak kurang dari 419 triliun rupiah atau 12,62 persen dari total belanja pemerintah. Ada yang harus dipikirkan dengan perencanaan yang baik, bagaimana perencanaan fiskal daerah dan nasional, belum ada keselarasan yang penuh, masih ada deviasi. Kebijakan pemerintah melakukan alokasi belanja pemerintah, seharusnya bisa <i>men-transform</i> pembangunan dengan perencanaan yang baik. • Peran Kementerian Keuangan untuk mendorong kemandirian fiskal, melakukan intervensi melalui UMKM. • Kondisi sektor pertambangan yang mulai menurun tapi yang lain stabil, apakah sebagai desain ataupun adanya kebijakan. • Kontribusi PDRB Sumatera sekitar 21-23 persen. Secara ADHB masih stabil, dengan kecenderungan menurun. Yang masih dinamis yaitu di pertambangan, perdagangan, dan pertanian. Tapi dinamikanya di beberapa periode terjadi pertukaran posisi, seperti pertanian pada 2022 yang menurun. 	

Sesi Diskusi

1. Pertanyaan dari Sdr. Fahrul (Bengkulu), untuk narasumber Bappenas:

Mengutip dari publikasi BPS terkait neraca arus energi dan neraca emisi gas rumah kaca Indonesia tahun 2017-2021, salah satu fokus pembangunan di Provinsi Bengkulu adalah ekonomi hijau. Pertumbuhan ekonomi/ekstraksi SDA pasti mengakibatkan dampak terhadap lingkungan. Jika dikaitkan dengan Bengkulu sebagai penghasil batubara, atau sama dengan provinsi lain di Sumatera bahwa penggunaan energi fosil masih cukup besar. Penggunaan energi fosil dari sisi efisiensi hanya dipakai 57 persen, sisanya hilang diserap lingkungan. Apakah Bappenas sudah memiliki *grand design* terkait ini. Penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masih stagnan 3,5-4 persen, sementara energi minyak menurun, tapi penggunaan batubara semakin meningkat. Terkait dengan kondisi pertambangan, apakah ada upaya dari Bappenas untuk mengetahui kapan energi fosil dapat tergantikan dengan energi terbarukan?

Jawaban:

Perubahan menuju target *zero emission*, penggunaan bahan bakar fosil akan dikurangi atau dimatikan dalam 3-7 tahun ke depan. Menggunakan EBT menjadi tantangan bagi PLN, dimana instalasi PLTU yang sedemikian besar, harusnya masih beroperasi tapi harus beralih ke ekonomi hijau. Ke depannya itu memang harus ada keseimbangan, tidak bisa semerta-merta kemudian diubah ke energi hijau. Lebih ke ekonomi sirkular, bahwa produk sisa digunakan untuk menghasilkan produk yg lain. Ketersediaan kita di konvensi internasional, 102 negara menyatakan di 2050, Indonesia di tahun 2060. Kita harus imbangi dengan penghijauan, ekonomi sirkular (produksi SDA pada tingkat disposable bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang lain), tidak menambah polusi dsb. Kebijakan masih dikaji terus-menerus. Pelan-pelan beralih ke energi solar, tapi impor juga akan menjadi beban.

2. Pertanyaan dari Sdr. Nugraha Puguh (Sumatera Selatan), untuk narasumber BI:

Warning yang disampaikan, terkait konsumsi masyarakat 60 persen menopang PDRB. Saat ini *trend* menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, namun disisi lain menekan minat konsumsi masyarakat maupun minat investasi dari pengusaha. Apakah dari Bank Indonesia sudah melihat atau mengkaji dampak dari peningkatan suku bunga tadi terhadap *trend* konsumsi ke depan? Kalau seandainya ada, kira-kira alternatif seperti apa yang sedang diupayakan atau yang efektif kita upayakan dengan angka suku bunga yang cukup tinggi ini, namun tetap bisa menahan atau mendorong konsumsi dari masyarakat?

Jawaban:

Kebijakan suku bunga itu adalah sebuah kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan. Bagaimana kita bisa melakukan konsumsi, investasi tapi kondisi negara tidak stabil. Peran BI yang pertama adalah menjaga kestabilan dengan menjaga suku bunga di level yang dipandang cukup untuk menjaga ekonomi itu stabil. Kebijakan makroprudensial di *slide 27*, terjadi penguatan USD terhadap seluruh mata uang. Jika rupiah menguat terhadap mata uang lain, ekspor akan semakin bermasalah. Kebijakan *pro-growth*, BI memberikan insentif kepada sektor riil apabila memiliki konsumsi yang lebih tinggi. Insentif kepada sektor terkait dengan UMKM, ekonomi hijau, terkait dengan ekonomi yang tujuannya untuk ekspor.

3. Pertanyaan Edih Mulyadi (Kakanwil DJPb Bangka Belitung), untuk narasumber Bappenas dan BI: Kita menghadapi bonus demografi, puncak tiap daerah berbeda-beda. Apa konsekuensinya? Pemda sedang menyusun RPJMD. Apakah peran Bappenas dalam mengontrol hal ini agar kebijakannya betul-betul efektif?

Terkait kebijakan BI terhadap pengendalian inflasi, terjadi divergensi dimana masing-masing negara beda kebijakan moneter. Kebijakan BI secara spesifik untuk mengendalikan inflasi, pada saat inflasi tinggi, suku bunga naik supaya jumlah uang beredar relatif bisa berkurang. Mohon penjelasan lebih rinci terkait dengan peran BI dalam pengendalian inflasi?

Pariwisata di Provinsi Bangka Belitung, peran pertambangan timah bukan unggulan lagi. Sekarang sudah ada transformasi ke sektor pariwisata. Diperlukan *event* untuk suatu daerah, kemudian turis datang. Masalahnya orang tidak bisa datang karena penerbangan mahal. Bagaimana bisa agar harga tiket pesawat ini jangan menjadi satu kendala di dalam peningkatan perekonomian terutama sektor pariwisata?

Jawaban Bappenas:

Kebijakan bersifat nasional. Jika menghadapi bonus demografi di mana penduduk mayoritas di atas 60 persennya adalah angkatan muda atau produktif, artinya kita harus meningkatkan pendidikan, meningkatkan lapangan pekerjaan, menuju lebih inovatif kemudian juga meningkatkan upskilling bagi sumber daya manusia. Menghadapi lansia, kita menghasdai perlindungan yang adaptif yaitu bukan saja untuk usia produktif, tapi juga lebih luas untuk anak-anak, lansia, usia rentan lainnya.

Jawaban BI:

Bukan hanya kebijakan moneter untuk menjaga inflasi terkendali. Kebijakan diarahkan untuk menjaga kestabilan dari sisi nilai tukar. Bersama-sama dengan pemerintah masuk ke dalam program GNPIP, TPID/TPIP setiap bulan. Kami memiliki target tertentu, di sinilah kita bekerja sama.

Terkait dengan mendorong pariwisata, tapi harga tiket mahal. Karena memang harga *aftur* tinggi, operasional perlu biaya tinggi untuk perbaikan pesawat, sehingga perlu kompensasi. Pajak mendatangkan suku cadang dsb. Untuk menurunkan *cost* bukan hanya dari sisi transportasi, tetapi sinergi misalkan saya datang bukan hanya ke Babel, tetapi mungkin ke daerah-daerah sekitar dimana ongkosnya relatif lebih rendah, inilah sinergi yang kemudian kita perlu bekerja sama, misalkan antara Babel kemudian dengan Batam, mungkin dengan Riau dan Jambi. Bisa semacam paket wisata beberapa provinsi. Siapa yang mengorkestra di Sumatera, inilah yang mungkin bisa diusulkan di dalam Konreg berikutnya atau di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini di wilayah Sumatera.

Jambi, 30 Agustus 2024

Mengetahui

Kepala BPS Provinsi Jambi

Notulis 1

Notulis 2



Poppi Marini



Nor Indah F. Ningrum



Agus Sudibyo